

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KESAKSIAN NON-MUSLIM
TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA GOWA



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Jurusan Akhwalu Syahsiyah/ Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

OLEH

ZAINAL ABDUH
NIM. 10100109045

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh penyusun batal demi hukum.

Makassar, 23 Juli 2013

Penyusun,

Zainal Abduh
NIM. 10100109045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara, **Zainal Abduh**, NIM: 10100109045, mahasiswa Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kesaksian Non-Muslim Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan ke ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 23 Juli 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Sabri AR, M.Ag
Nip: 19670714 199203 1 003

A. Intan Cahyani S.Ag, M.Ag.
Nip: 19571231 198403 1 013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Zainal Abduh, NIM : 10100109045. Mahasiswa jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kesaksian Non-Muslim Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa ”. Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 8 Juni 2013 M, bertepatan dengan 29 sya’ban 1434 H, telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum islam (S.HI), dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, M.A. (.....)

Penguji II : Drs. Muhammad Sabir Maidin, M.Ag. (.....)

Pembimbing I: Dr. Muhammad Sabri AR, M.Ag (.....)

Pembimbing II: A. Intan Cahyani S.Ag, M.Ag. (.....)

Makassar, 23 Juli 2013

Dekan Fak. Syari’ah dan Hukum

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.
NIP. 19570414 198603 1 003

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

AssalamuAlaikumWr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjat kan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk *Nabiullah* Muhammad saw. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir.

Dengan penuh rasa hormat, pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku, Abduh dan Intan, serta waliku Hj. Sehang yang ikhlas membiayai kuliahku hingga sarjana, sungguh pengorbanan yang tak akan pernah mampu aku balas. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Qadir Gassing, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberi ruang kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Hijau ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A., sebagai Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf yang telah banyak membantu selama penulis kuliah.
3. Bapak Dr.H. Abd. Halim Talli, S.Ag. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Peradilan. Juga kepada Ibu Intan Cahyani. S.Ag. M.Ag, selaku sekretaris jurusan Peradilan, sekaligus sebagai pembimbing II saya, terimakasih atas bimbinganya bu.

4. Bapak Dr. Muhammad Sabri AR, M.Ag. selaku dosen dan pembimbing I penulis, terima kasih atas segala bimbingannya pak.
5. Keluarga besarku yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan, kakak-kakak dan adik-adikku, serta Ikin, Joe, dan Adi yang setia memberiku semangat.
6. Sahabat dan saudara-saudariku di UKM LDK Al-Jami, terimakasih atas perhatian kalian. Sahabat-sahabatku di Jurusan Peradilan angkatan 2009, terus berjuang dan jangan menyerah. Senior-senior yang penulis banggakan dan semua teman-teman yang selalu memberi inspirasi kepada penulis.. *Jazakumullah khairan katsira*, Penulis hanya berharap segala bantuan dan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik.

Sebagai insan biasa yang tak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan kedepan.

Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Besar harapan jika skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin...

Billahitaufikwalhidayah

WassalamuAlaikum Wr. Wb.

Samata, Gowa, 23 Juli 2013

Penyusun,

Zainal Abduh

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Defenisi Oprasional dan Ruang Lingkup Penelitian..... | 7 |
| D. Kajian Pustaka | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Pengertian Saksi | 13 |
| B. Dasar Hukum Alat Bukti Saksi | 17 |
| C. Syarat-syarat Menjadi Saksi..... | 20 |
| BAB III SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN AGAMA..... | 28 |
| A. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi | 28 |
| B. Tujuan dan Manfaat Saksi Sebagai Alat Bukti..... | 35 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 40 |
| A. Saksi Non-Muslim Dalam Persfektif Hukum Islam..... | 40 |
| B. Legalitas Kesaksian Non-Muslim di Pengadilan Agama | 52 |
| BAB V PENUTUP..... | 61 |
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran-saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |

ABSTRAK

Nama : **ZAINAL ABDUH**
Nim : 10100109045
Judul : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kesaksian Non-muslim Pada
Perkara Perdata di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas yaitu “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kesaksian Non-muslim Terhadap perkara Perdata di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa”, maka dapat diuraikan tentang kesaksian non-muslim di depan sidang pengadilan Agama sebagai salah satu alat bukti yang dipergunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan kesaksian sebagai alat bukti dalam hukum acara Peradilan Agama di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa sangat menentukan proses jalannya persidangan, hal mana di kenal bahwa kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang kuat, sekalipun menimbulkan masalah sesuai peraktek di pengadilan Agama Gowa. Dimana seorang saksi harus mengetahui peristiwa dan kejadian yang disaksikanya itu dengan melihat dan mengalami sendiri, serta tidak boleh dengan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa. Dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan masyarakat menjadi kompleks, dalam segi terjadi pembauran sehingga tidak menutup kemungkinan yang menjadi saksi dalam peristiwa atau kejadian tersebut disaksikan oleh seorang non-muslim.

Dalam hal pembuktian di Pengadilan Agama pun mempunyai banyak aturan yang menyinggung masalah saksi, khususnya pada asas Peradilan Agama yaitu asas personalitas keislaman, oleh karena itu penulis berusaha menguak beberapa pandangan para ulama serta praktisi hukum mengenai kesaksian non muslim di Pengadilan Agama, khususnya para hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. Sehingga dari beberapa pandangan dan penelitian lapangan yang dilakukan penulis bisa menarik suatu kesimpulan mengenai kesaksian non muslim di Pengadilan Agama.

ABSTRAK

Nama : Zainal Abduh

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kesaksian Non-muslim Pada Perkara Perdata di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kesaksian Non-Muslim Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa”** bermakna suatu uraian tentang pengakuan seseorang di depan sidang pengadilan Agama sebagai salah satu alat bukti yang di pergunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan pengakuan sebagai alat bukti dalam hukum acara peradilan Agama di pengadilan agama Maros dalam kasus perceraian sangat menentukan proses jalannya persidangan, hal mana di kenal bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang terkuat, sekalipun menimbulkan masalah sesuai praktek di pengadilan Agama Maros dengan adanya terjadinya penarikan pengakuan yang telah di kemukakan sebelumnya, oleh karena demi maksud tertentu menguntungkan salah satu apabila terjadi pengakuan oleh salah satu pihak. Penulisan dalam menguraikan skripsi ini sangat memperhatikan berbagai macam buku-buku dan penelitian di lapangan tentang acara peradilan Agama Marosm termaksud Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pelaksanaan peradilan Agama di Indonesia. Dengan ini penulis memberikan konklusi bahwa di Negara republik Indonesia senantiasa memperlakukan alat bukti pengakuan yang dapat di jadikan dasar penulis dalam skripsi ini. Dan melakuakannya pengakuan sebagai alat bukti dalam Hukum acara peradilan Agama di Pengadilan Agama Maros dalam kasus perceraian, senangtiasa Hukum Acara yang ditunjuk oleh UU. No. 7 Tahun 1989.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Oleh karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KESAKSIAN NON-MUSLIM TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA GOWA” dapat selesai, namun penulis mengakui bahwa telah dapat bantuan, baik moral maupun material oleh beberapa pihak. Untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya terutama kepada :

1. Orang Tua penulis yang tercinta, dengan segala susah payahnya mengasuh dan memberi biaya dan pendidikan dari kecil hingga saat ini dalam penyelesaian studi program sarjana strata satu (S1).
2. Bapak Dekan, para pembantu Dekan dan staf pada Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar Gowa samata, telah memberikan motivasi dan semangat belajar hingga penulis menyelesaikan studinya.
3. Bapak Pembimbing 1 dan Pembimbing 2, masing-masing; Dr. H. Halim Talli S. Ag. M. Ag. Dan A. Intan Cahyani S. Ag., M. Ag. Telah memanfaatkan sebagai waktunya memberikan bimbingan penulis pada penyelesaian skripsi ini.
4. Para tenaga pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Samata Gowa. Yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan sejak menduduki bangku kuliah hingga selesai yang nantinya dapat dimanfaatkan kepada nusa, bangsa dan Agama.
5. Rekan-rekan Mahasiswa yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas amal bakti mereka, penulis serahkan kepada Allah swt, mudah-mudahan dapat dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Allahu maufik.....

Makassar, 24 Muharram 1989. H.

18 April 1990 M.

Penulis,

Zainal Abduh

10100109045

DAFTAR ISI

| | |
|--|--|
| Halaman Judul..... | |
| Pengesahan..... | |
| Abstrak..... | |
| Kata Pengantar..... | |
| Daftar Isi..... | |
| Bab 1. Pendahuluan | |
| A. Permasalahan..... | |
| B. Rumusan Masalah..... | |
| C. Hipotesis..... | |
| D. Defenisi Oprasional dan Ruang Lingkup Pembahasan..... | |
| E. Alasan Memilih Judul..... | |
| F. Metodologi..... | |
| G. Garis-garis Besar Isi Skripsi..... | |
| Bab. 2. Peradilan Agama..... | |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Peradilan..... | |
| B. Unsur-unsur Peradilan Agama..... | |
| C. Sejarah Peradilan Agama..... | |
| Bab 3. Pengakuan Dalam hukum Acara Perdilan Agama | |
| A. Pengertian dan Dasar hukum Pengakuan..... | |
| B. Sahnya suatu Pengakuan..... | |
| C. Kedudukan Pengakuan Dalam Hukum Acara Peradilan Agama.... | |
| Bab. 4. Problematika Pengakuan Dalam Hukum Acara Peradilan Agama Maros.... | |
| A. Akibat Hukum yang ditimbulkan Pengakuan..... | |
| B. Problematika pengakuan Sebagai Alat Bukti di Persidangan..... | |
| C. Aturan Acara hukum Agama dalam problematika Pengakuan..... | |
| Bab. 5. Penutup | |
| A. Kesimpulan..... | |
| B. Saran-saran..... | |

Daftar Pustaka.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meskipun lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura telah dibentuk oleh pemerintah Belanda dengan Stb. 1882 Nomor 152 jo. Stb. 1937 Nomor 116 dan 610, di Kalimantan selatan dengan Stb. 1937 Nomor 638 dan 639, kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah membentuk Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dengan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, tetapi dalam peraturan tersebut tidak di singgung sama sekali tentang Hukum Acara yang harus dipergunakan oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang di ajukan kepadanya. Oleh karena tidak ada ketentuan resmi tentang Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama, maka para hakim dalam mengadili perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama mengambil intisari Hukum Acara yang ada dalam kitab-kitab fiqh, yang dalam penerapannya berbeda dalam satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama yang lain.

Ketentuan mengenai Hukum Acara di Pengadilan Agama baru ada sejak lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya, ini pun baru sebagian kecil saja yang diatur dalam kedua peraturan ini. Ketentuan tentang Hukum Acara baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini selain diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, juga di

dalamnya juga diatur Tentang Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Tidak semua ketentuan tentang Hukum Acara Peradilan Agama dimuat secara lengkap dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, ini dapat dilihat dalam pasal 54 dikemukakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini¹.

Melihat bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga yudikatif yang kewenangan absolutnya, hukum materilnya menggunakan atau berdasarkan Hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam bab III pasal 49 s/d 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam pasal 49 ditentukan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, keewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah.²

Hukum Acara perdata di dalamnya mengatur tentang bagaimana beracara di depan sidang pengadilan, misalnya mengajukan surat gugatan, pembuktian dalil-dalil gugatan, melakukan sita jaminan, menjatuhkan putusan sela dan sebagainya. Oleh karena itu, melalui pasal 11 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 negara kita memberlakukan Hukum Acara perdata yang terdapat pada

¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), h. 2.

² *Ibid.*, h. 10.

peraturan-peraturan mengenai alat-alat bukti dalam HIR (*herzeine Indonesische Reglement*) pada pasal 164 , Rbg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) pada pasal 284, BW (*Burgelijke Wetboek*) pada pasal 1866 sebagai berikut :

1. Bukti Surat
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. dan Sumpah.

HIR masih mengenal pula alat pembuktian lain yaitu pasal 153, pemeriksaan setempat, dan pasal 154 tentang keterangan ahli.

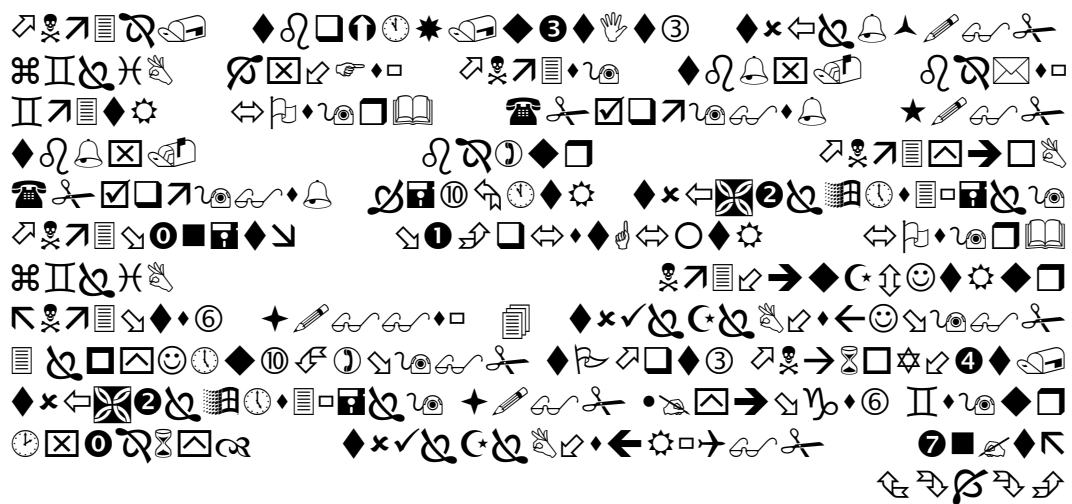
Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Islam, Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa alat bukti ialah meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Sedangkan kebanyakan Fuqoha' berpendapat bahwa alat bukti itu ada 7 macam yaitu :

1. Iqrar (Pengakuan)
2. Saksi
3. Sumpah
4. Nukul
5. Qosamah
6. Pengetahuan hakim
7. dan Qorinah-qorinoh yang dapat dipergunakan³.

³ *Ibid.*, h. 24.

Menurut Hukum Acara Islam dan hukum acara perdata, bukti saksi merupakan alat bukti yang penting dan pokok. Namun dalam kaitan-nya dengan saksi non muslim, dalam hukum acara perdata, tidak mempermasalahkan saksi non muslim. Dalam Hukum Islam kesepakatan fuqaha saksi non muslim tidak diterima kesaksiannya.

Para ahli Hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan (*tauliyah*), sedang orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam sebagaimana disebutkan dalam dalam firman Allah swt. surat al-Nisa' 4/141⁴ :



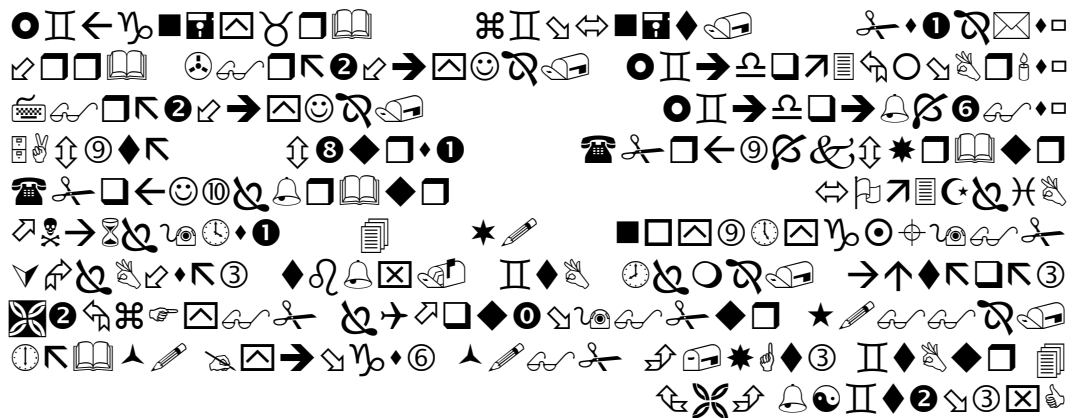
Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan

⁴ Ibid., h.125.

memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.⁵

Surat At-Thalaq 65/2 :



Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.⁶

Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i menolak kesaksian orang-orang non muslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non muslim terhadap suatu peristiwa dan kejadian. Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian orang non muslim kepada orang Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli Hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali. Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran itu

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 101.

⁶ *Ibid.*, h. 558.

adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaanya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima. Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qayyim tidak ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pendapat Ibnu Qayyim sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, dimana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi membaaur satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila terjadi permasalahan diantara mereka bukan suatu hal yang mustahil peristiwa atau kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Para praktisi hukum di beberapa Negara Islam, pendapat Ibnu Qayyim ini banyak dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, kalau syarat hukum berkenaan dengan syarat materiil dan berhubungan dengan *diyanatun*, sedangkan sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan *qadlan*.

Dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama sering dijumpai bahwa kasus-kasus yang memerlukan bantuan pihak lain, seperti pembuktian yang akan disampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam, visum dokter yang dibuat oleh dokter yang bukan beragama islam, atau bukti-bukti lain yang berkaitan langsung dengan orang non muslim. Apabila para hakim tetap

berpegang kepada fiqh–fiqh tradisional, sudah barang tentu kasus-kasus tersebut akan mengalami hambatan pada penyelesaiannya.

Elastisitas Hukum Islam dengan segala problematikanya saat ini merupakan tantangan bagi praktisi hukum untuk lebih mendalami falsafah Hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat diterapkan dalam suasana yang lebih baik pada suatu waktu dan tempat sehingga masyarakat dapat menerimanya. Di samping itu peranan praktisi hukum di Pengadilan Agama dalam mengantisipasi perubahan sosial dan perubahan nilai dalam masyarakat sangatlah diharapkan. Para praktisi hukum di pengadilan agama harus berani memikul tanggung jawab dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan secara konkrit dengan berperan sebaik-baiknya dalam menafsirkan aturan hukum yang berlaku, menciptakan hukum baru, mencari asas–asas hukum baru dan kalau perlu melakukan *contra legem* dari suatu aturan hukum yang berlaku saat ini.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai Kesaksian Non-muslim Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Agama

Berdasarkan pokok masalah diatas sekaligus mempejelas masalah yang akan diteliti, maka dapat diidentifikasi masalah yang hendak dikaji, yaitu :

1. Bagaimanakah Pandangan Ulama Terhadap Kesaksian Non-muslim dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama ?

⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Op. Cit., h. 125-129.

2. Bagaimanakah Kedudukan saksi Non-Muslim di Pengadilan Agama Sungguminasa ?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap pengertian yang sebenarnya, maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi ini :

“*Saksi*” adalah orang yang dimintai keterangan tentang suatu peristiwa dalam kepentingan pemeriksaan atau keterangan yang diberikan oleh orang yang melihat kejadian secara langsung⁸. Sedangkan Non-Muslim merupakan penggabungan dua kata yaitu non dan muslim yang berarti orang yang bukan beragama Islam.

“*Kesaksian*” adalah keterangan (pernyataan) yang diberikan oleh saksi⁹.

Sementara pengertian Pengadilan Agama tercantum dalam pasal 2 Undang-nudang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :

*“Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”*¹⁰.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat

⁸ Abdillah Pius, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkola, t.th), h. 552.

⁹ *Ibid.*, h. 552

¹⁰ Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia¹¹.

D. Kajian Pustaka

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini, adapun literatur-literatur yang penulis baca dan kutip dalam menyelesaikan pembahasan ini diantaranya :

1. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, oleh Anshoruddin. Buku ini membahas mengenai hukum pembuktian, berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai aturan Peradilan Agama.
3. *Peradilan Agama Indonesia* (sejarah pemikiran dan realita), oleh Erfaniah Zuhriah, M.H. buku ini membahas secara detail dan runtut tentang perjalanan panjang Peradilan Agama di Indonesia.

Penulis menemukan beberapa hasil penelitian tentang masalah yang di kaji, namun perbedaan peneliatan ini dengan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu lebih ditegaskan pada kajian lapangan dan pandangan para ulama serta beberapa ahli hukum mengenai kesaksian Non-muslim.

E. Metode Penelitian

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 16.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai obyek yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Metode pendekatan

- a. Pendekatan Yuridis, Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Pendekatan Syar'I, yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Library Research* atau penelitian kepustakaan dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh melalui penelusuran buku-buku dan sumber bacaan seperti jurnal, surat kabar, majalah, dan lain-lain.

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui *Field Research* atau penelitian lapangan dengan cara interview (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau

lebih beratatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan¹².

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yaitu suatu jenis data yang mengkategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan lebih konferehensif.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *library research*(kepastakaan) dan *field research*(penelitian lapangan).

c. Teknik pengumpulan data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih beratatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan¹³.
2. Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya.

¹² Cholid Norbuko, dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 83.

¹³ *Ibid*, h. 83.

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen seperti tulisan, gambar atau foto¹⁴.

d. Instrumen pengumpulan data

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan. Yang kedua yaitu alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengorganisasi data, baik yang diperoleh dari data tertulis maupun dari hasil wawancara.
2. Proses data dengan cara memilah-milah data.
3. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang sebelumnya telah dikategorikan.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 127.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a) Untuk mengetahui kedudukan saksi Non-muslim di Pengadilan Agama.
 - b) Untuk mmengetahui pandangan para ulama mengenai kesaksian Non-muslim di Pengadilan Agama.
2. Kegunaan Penelitian adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk mengetahui perkembangan kesaksian Non-muslim di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.
 - b) Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah referensi atas ilmu yang telah ada, memperluas wawasan dan memberikan informasi yang baru khususnya mengenai kesaksian Non-muslim di Pengadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaertian Saksi

Baiyyinah dalam istilah fuqaha, sama dengan syahadah (kesaksian). Tetapi ibn Al-Qayyim, memaknakan *bayyinah* dengan “segala yang dapat menjelaskan perkara”. Sedang *syahadah* ialah, “mengemukakan syahadah (ksaksian) untuk menetapkan hak atas diri orang lain”. Dengan kesaksian yang cukup syarat, nyatalah kebenaran bagi hakim dan wajiblah dia memutuskan perkara sesuai dengan kesaksian itu.

Para fuqaha telah menerapkan syarat-syarat yang wajib sempurna pada kesaksian supaya kesaksian itu harus diterima dan mesti dipergunakan. Demikian pula mereka telah menerangkan tentang orang-orang yang diterima kesaksiannya dan orang-orang yang ditolak kesaksiannya, tentang hukum berbeda kesaksian dari gugatan, tentang perbedaan para saksi satu sama lain, hukum mencabut kesaksian, menyuruh saksi bersumpah dan hal-hal yang diterima padanya kesaksian dengan jalan pendengaran. Demikian pula hukum bertentangan pada saksi antara dengan lain yang diajukan oleh dua orang penggugat yang masing-masing mengemukakan saksi¹.

Dalam hukum islam alat bukti saksi disebut dengan *Syahidah* bagi saksi perempuan. Kebanyakan para ahli Hukum Islam membedakan syahadah ini

¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: PT. Al-Ma'arif, 1964). h. 119.

dengan *bayyinah* berarti pembuktian di muka Pengadilan Islam, mungkin hanya dengan saksi saja.

Selanjutnya Ibnu Qayyim sebagaimana yang dikutip oleh Imam Muhammad bin Ismail Kahlani, mengemukakan bahwa kesaksian itu merupakan sebagian saja dari *bayyinah*. Lebih lanjut beliau mengemukakan *bayyinah* itu segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran terhadap sesuatu perkara yang disengketakan. Pendapat ini tepat untuk dipergunakan, oleh karena itu para ahli Hukum Islam banyak menggunakan pendapat ini untuk kepentingan Acara Peradilan Islam. Sehubungan dengan hal ini maka yang disebut dengan *bayyinah* adalah memberikan keterangan sehingga dapat meyakinkan hakim terhadap suatu peristiwa. Sedangkan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang ada berdasarkan kepada penyelidikan yang mendalam, dan sesuatu yang telah diyakini tidak akan lenyap kecuali datangnya keyakinan yang lain lebih kuat dari pada keyakinan yang ada sebelumnya

Untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa yang diperiksanya, maka seorang saksi harus mengetahui peristiwa dan kejadian yang disaksikanya itu dengan melihat dan mengalami sendiri, serta tidak boleh dengan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa.²

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. *Kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan

² H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2008). h. 374-375.

keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka Hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. *Keempat*, saksi adalah keterangan (bukt pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *Keenam*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.

Dalam kamus Hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata maupun pidana. Merujuk pada pengertian saksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, dapatlah dikatakan bahwa pengertian saksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia sangat luas dibandingkan dengan kamus hukum yang mendefinisikan saksi sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP.

Dalam perkara perdata, keterangan saksi juga boleh diberikan secara tertulis, dikenal dengan istilah *affidavit*. Secara singkat *affidavit* diartikan sebagai pernyataan tertulis dan ditandatangani, yang dibuat dibawah sumpah yang menyatakan dukunganya terhadap sebuah isu yang relevan dengan perkara. Keterangan saksi adalah keterangan lisan di atas sumpah yang diberikan di muka Pengadilan. Dalam buku keempat KUHPerdata perihal pembuktian dan daluwarsa, tidak ada definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan saksi. Pasal 1895 sampai dengan pasal 1914 KUHPerdata yang mengatur tentang saksi hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan saksi. Hal ini

berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP yang memberikan defenisi saksi dan defenisi keterangan saksi.³

Namun dalam literatur lain dikatakan bahwa, kesaksian adalah alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi, yang bukan pihak dalam perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan.

Dengan demikian, unsur yang harus ada pada alat bukti kesaksian adalah :

1. Keterangan kesaksian itu diucapkan sendiri oleh saksi secara lisan dimuka persidangan.
2. Tujuannya untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang dipersengketakan.
3. Saksi itu bukan salah satu pihak yang berperkara.

Sesuai dengan pengertian di atas, jelaslah bahwa keterangan yang diberikan secara tertulis oleh saksi bukan alat bukti kesaksian, melainkan bernilai alat bukti tertulis atau surat. Mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi itu, atau yang dinamai “keterangan kesaksian” haruslah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi.

Sehingga keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga atau *testimonium de auditu* pada umumnya tidak diperkenankan. Asas dari kesaksian ini adalah *Unus Testis Nullus Testis*, satu saksi bukan saksi. Ini berarti bahwa jika hanya ada satu kesaksian, maka tidak boleh diterima sebagai alat bukti. Minimal harus dua

³ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta : Erlangga, 2012), h. 55-57.

kesaksian. Keterangan satu orang saksi, kalau keterangan itu dapat dipercaya oleh hakim, barulah dapat menjadi alat bukti sempurna jika dilengkapi alat bukti lain.⁴

B. Dasar Hukum Alat Bukti Saksi

Kesaksian yang telah memenuhi syarat formal dan materil mempunyai nilai pembuktian bebas, nilai kebenaran kesaksian sifatnya tidak sempurna dan tidak mengikat baik kepada pihak-pihak maupun terhadap hakim, hakim bebas menilai kebenaran keterangan saksi sesuai dengan nuraninya, bahkan hakim dapat mengesampingkan keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup dan berdasarkan argumentasi yang kuat.

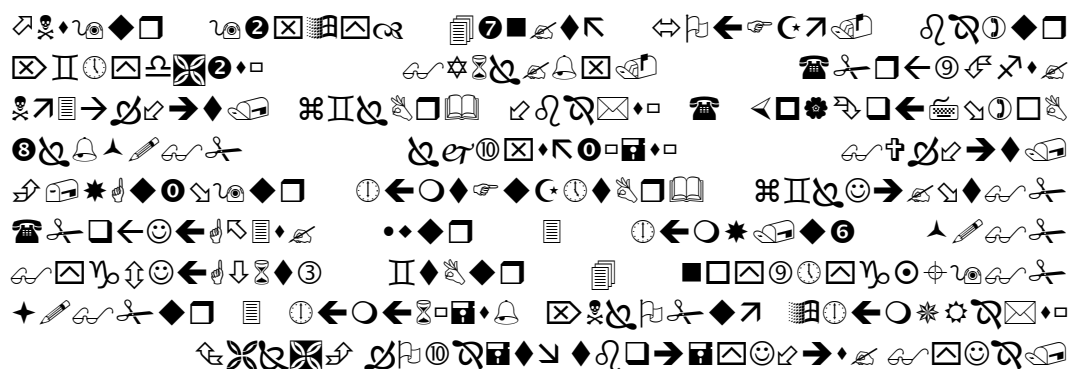
Jika kesaksian berasing-asing tentang beberapa kejadian yang saling besesuaian dan berhubungan, maka diserahkan kepada hakim dalam menghargai nilai kesaksian yang sedemikian kuat menurut keadaan. Dalam pemeriksaan saksi-saksi, hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut, suatu hal meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi atas segala yang disampaikannya.

Agar dapat terlaksana dengan baik, hakim harus memerhatikan dengan saksama cara hidup saksi-saksi yang diajukannya, tentang adat istiadat dan martabat kehidupan dalam masyarakat apakah tercela atau punya kebiasaan jelek sehingga tidak dapat dipercaya. Hakim harus memerhatikan dengan cermat segala

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heriani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 92-93.

sesuatu yang memengaruhi sikap saksi dan apa yang mendorong saksi itu menerangkan segala sesuatu dalam persidangan⁵.

Menurut Islam, hukum kesaksian atau *Syahada* adalah *fardhu' ain* bagi orang yang terkena apabila dipanggil untuk hal-hal yang dikhawatirkan kebenarannya akan hilang tanpanya, bahkan hukumnya wajib jika dikhawatirkan lenyapnya suatu kebenaran meskipun ia tidak dipanggil untuk itu, sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS al-Baqarah 2/283



Terjemahnya :

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁶.

Pelaksanaan kesaksian dihukumkan wajib apabila saksi mampu melakukannya tanpa ada bahaya yang mengancamnya, baik bagi dirinya, kehormatannya, hartanya maupun keluarganya. Jadi setiap saksi yang memberikan kesaksiannya di depan hakim hendaknya memperoleh jaminan keamanan baik jiwa,

⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Cet. I; Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 68-69.

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan...op.cit.*, h. 49.

harta, dan kehormatannya. Karena setiap kesaksian itu dipandang wajib bagi setiap orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan akan setiap perkara yang mana ia ketahui dengan pasti akan kebenaran tersebut.

Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang – undang menentukan lain seperti pembuktian persatuan harta kekayaan, dalam harta kekayaan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin. Dalam hukum perdata khususnya dalam ruang lingkup peradilan Agama alat bukti saksi tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, begitu pula dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh sebab itu Pengadilan Agama harus berpedoman kepada alat bukti saksi yang diatur dalam hukum acara perdata peradilan umum. Adapun dasar hukum saksi diatur dalam pasal 139-152 dan pasal 168-172 HIR, serta pasal 165 – 179 R.Bg, dan pasal 1902-1912 BW.⁷

Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 164 HIR dan pasal 284 R.Bg harus terbtas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri, dan harus pula disertai dengan alasan-alasan sebgaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi – saksi tersebut. Pendapat dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan buah pikiran bukanlah kesaksian (pasal 171 HIR dan Pasal 308 R.Bg).⁸

⁷ Sudikno Mortokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta : Liberty, 1988), h. 128.

⁸ H. Abdul Manan, *op.cit.*,h. 249.

C. Syarat-syarat Menjadi Saksi

Mengenai kedudukan saksi dalam hukum pembuktian yaitu sebagai alat bukti diantara alat bukti yang lainnya yang dapat diajukan oleh pihak – pihak yang berperkara. Namun dalam berbagai alasan demi untuk membuktikan suatu kebenaran antara pihak-pihak yang berperkara, hingga adanya saksi sebagai alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, tidak begitu saja diterima sebelum saksi yang diajukan kemuka Pengadilan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum pembuktian.⁹

Fiqh Islam, menurut pendapat yang dipegang oleh para jumhur fuqaha, menerima kesaksian dalam segala macam keadaan. Akan tetapi dengan adanya ketentuan-ketentuan dan ada batasannya, berdasarkan perbedaan – perbedaan mazhab dan perkara-perkara yang dihadapi. Para fuqaha menetapkan bahwa dalam kesaksian ini diperlukan bilangan. Karena hal ini merupakan urusan ibadah walaupun sebenarnya menurut logika kebenaran itu berdasarkan kepada keadilan dan kejujuran orang yang memberikan kesaksiannya, bukan kepada bilangannya.¹⁰

Untuk memberikan kesaksian yang dapat diterima serta dapat dijadikan pembuktian kuat wajib memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

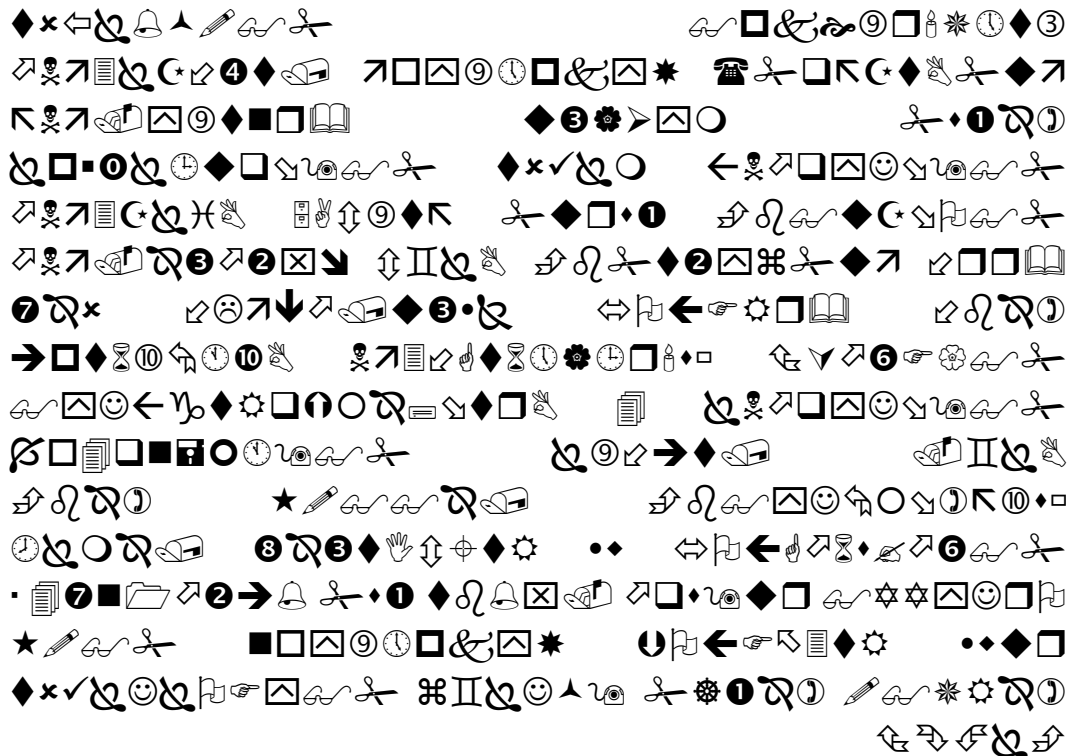
1. Islam

Para ulama sepakat bahwa syarat dalam penerimaan kesaksian adalah islam, tidak dibolehkan kesaksian oleh orang kafir atas muslim, kecuali mengenai masalah yang mereka perselisihkan tentang dibolehkannya hal itu dalam wasiat

⁹ Ahmad Hanafi, MA., *Asas-asas Hukum Pidana Acara Islam* (Yogyakarta :PT . Al-Ma'arif, t.th), h. 119.

¹⁰ TM. Hasbi Ash Shiddeqy, *Peradilan Dan..op, cit.*, h. 119-120.

dalam keadaan bepergian, berdasarkan firman Allah swt. Dalam QS al-Ma'idah 5/106 :



Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".¹¹

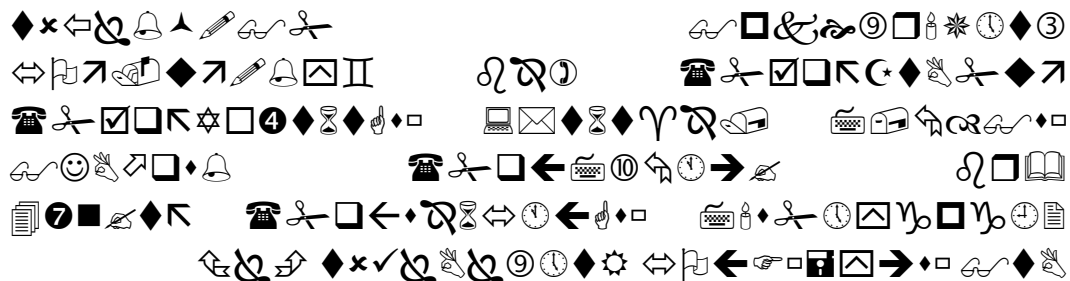
2. Adil

Keadilan dalam hukum Islam ditentukan oleh tujuannya, dengan demikian konsep keadilan dalam Islam berbeda dengan konsep keadilan dalam hukum sipil, karena kedua hukum itu berbeda. Keadilan dalam hukum Islam digantungkan

¹¹ Departemen Agama., Al-Qur'an dan ... *op.cit.*, h. 125.

kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah swt. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditentukan oleh Allah swt., pasti adil.¹²

Adil merupakan sifat tertentu yang harus tampak pada orang yang akan menjadi saksi. Adapun sifat – sifat yang nampak (batinyah), maka seorang hakim tidak dibebani menyikapinya karena hal itu hanya Allah swt., yang tahu. Jika hakim tahu keadilannya maka persaksianya bisa diterima, jika dia tahu bahwa dia termasuk orang yang fasik, atau hakim menemukan hal – hal yang menghilangkan keadilannya atau hakim tahu bahwa persaksianya itu ditolak dan tidak bisa diterima. Oleh sebab itu seorang hakim harus selalu teliti, sebagaimana firman Allah swt., dalam QS al-hujarat 49/6 :



Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.¹³

Sifat adil merupakan sifat tambahan bagi syarat islam yang harus dimiliki oleh para saksi. Kaum muslim sepakat tentang dimasyarakatkannya keadilan agar

¹² Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 45-46.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan...Op, .cit.*, h. 516.

kesaksian seorang saksi dapat diterima. Maksud adil adalah kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya dan mereka tidak dikenal sebagai orang yang biasa berdusta.

Para ahli fiqh berpendapat bahwa sifat adil itu berkaitan dengan kesalehan dalam agama dan memiliki sifat *murū'ah* (wibawa). Kesalehan dalam agama terpenuhi dengan melaksanakan hal yang fardhu, sunnah dan menjauhi hal yang diharamkan dan dimakrurkan, serta tidak melakukan perbuatan dosa besar dan menjauhi kebiasaan melakukan dosa – dosa kecil. Sedangkan *murū'ah*, hendaknya seseorang melakukan perbuatan dengan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat baik dan meninggalkan apapun perbuatan yang menjelekkan dirinya, baik perkataan maupun perbuatan.

Sesungguhnya, keadilan merupakan satu nilai ajaran islam yang termulia dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, akan menebarkan ketentraman, menyebarkan rasa aman, memperkuat hubungan antar individu, memperkuat rasa kepercayaan, menambahkan kesejahteraan. Keadilan hanya dapat terwujud dengan menyampaikan setiap hak kepada orang yang berhak dan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah swt.

3. Baligh

Apabila sifat adil merupakan syarat penerimaan kesaksian, maka baligh juga termasuk syarat sifat adil. Oleh karena, tidak diterima kesaksian oleh anak kecil walaupun bersaksi sesama anak kecil. Anak kecil yang belum baligh, tidak diterima persaksiannya jika dia memberikan persaksian sedangkan dia masih kecil, maka persaksiannya itu ditolak. Jika dia memberikan persaksiannya lagi untuk

kedua kalinya setelah dia baligh, maka persaksianya itu tetap tidak dapat diterima. Namun dia saat masih kecil tidak memberikan persaksianya dan setelah dewasa (baligh) barulah dia bersaksi, maka persaksianya bisa diterima.¹⁴

4. Berakal

Persaksian dari pada saksi dapat dijadikan sebagai pembuktian dalam Peradilan Agama jika saksi memiliki akal dan jiwa yang sehat sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh saksi dalam suatu persaksian.

5. Merdeka

Jumhur fuqaha berpendapat disyaratkan kemerdekaan pada penerimaan kesaksian, jadi, persaksian hamba sahaya tidak bisa diterima saat dia masih murni menjadi hamba sahaya, karena saksi disertai kekuasaan, sedangkan hamba sahaya tidak dapat disertai kekuasaan.

Sedangkan ahli zhahir berpendapat bahwa kesaksian seorang budak dibolehkan, karena pada dasarnya yang diisyaratkan hanyalah keadilan, sedangkan perbudakan tidak berpengaruh dalam penolakan kesaksian tersebut, kecuali jika ada dalil yang tetap mengenai hal itu dari al-Qur'an, sunnah dan ijma. Seolah-olah jumhur berpendapat bahwa perbudakan adalah salah satu bekas kekafiran, maka hal itu harus berpengaruh dalam penolakan kesaksian.¹⁵

6. Bukan Musuh Terdakwa, dan Bukan Anak Atau Bapaknya

Tidak dapat diterima kesaksian karena ketertarikan atau permusuhan. Umar bin khattab, Umar Bin Abdul Aziz, Al-Itrah, Abu Tsaur dan Asy Syafi'i

¹⁴ Muhammad Rawwas Qa'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab r.a.* (Cet. I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 565.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mutjahid* (jilid 2; Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 942.

dalam satu perkataanya menentang hal itu. Mereka berpendapat bahwa kesaksian orang tua atas anaknya dan kesaksian anak atas orang tuanya dapat diterima selama masing-masing mereka adil dan diterima kesaksiannya hal itu juga diungkapkan oleh Asy Syaukani dan Ibnu Rusyd.

Kesaksian seorang musuh atas lawanya tidak dapat diterima apabila permusuhan duniawi. Apabila permusuhan keagamaan, maka ia tidak menuntut tuduhan sebab agama menolak kesaksian palsu. Oleh sebab itu, dalam hal ini tidak ada tuduhan. Begitu juga tidak diterima kesaksian *ashal*, seperti kesaksian orang tua terhadap anaknya. Tetapi dibolehkan kesaksian atas keduanya. Misalnya kesaksian ibu terhadap anaknya dan kesaksian anak terhadap ibunya.¹⁶

Syarat-syarat saksi yang diuraikan di atas adalah merupakan syarat yang dikenakan pada seorang saksi sebelum memberikan kesaksian, karena saksi dalam hal ini merupakan orang yang menyaksikan suatu peristiwa hukum yang sekaligus sebagai syarat hukum dalam membuktikan kebenaran yang terdapat pada salah satu pihak yang mengajukan perkaranya di muka sidang, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syarat-syarat tersebut adalah merupakan ketentuan khusus yang diajukan oleh hukum pada seorang saksi.

Agar saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formal dan materil sebagai berikut.

Menurut hukum perdata, kesaksian itu harus memenuhi syarat baik itu syarat formal maupun syarat materil agar saksi-saksi dapat didengar sebagai alat bukti, adapun syarat-syarat tersebut yaitu :

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jilid IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 365-366.

Syarat-syarat formal alat bukti saksi :

- 1) Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan
- 2) Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.

Berdasarkan pasal 145 HIR dan pasal 172 R.Bg ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga searah dan semenda, karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak sekalipun sudah bercerai, anak-anak di bawah umur, dan orang yang tidak waras atau gila.

- 3) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi.

Berdasarkan pasal 146 ayat (1) HIR dan pasal 174 R.Bg, orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu sausaha dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak, sampai derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.

- 4) Mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya.

Syarat materil alat bukti saksi :

- 1) Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian

disebut *testimonium de auditu*. Keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

- 2) Keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 308 ayat (1) R.Bg. pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg.
- 3) Keterangan yang dibeikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 172 HIR dan pasal 309 R.Bg.¹⁷

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa yang terjadi antara orang-orang yang berperkara, atau lebih dikenal dengan pihak-pihak yang berperkara. Maka dalam hukum acara perdata dikenal adanya asas – asas hukum pembuktian yang di dalamnya terdapat saksi sebagai salah satu unsur pembuktian, yang melupakan pelengkap terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh penggugat. Karena pembuktian itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum perdata 1865 BW :

“Setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu orang lain, menunjukkan suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.¹⁸

¹⁷ H. Abdul Manan, *op. Cit.*, h. 250-251.

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW* (Cet. XIX; Jakarta : Pradnya Paramita, 2006), h. 419.

BAB III

SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN AGAMA

A. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi

Di Indonesia kita mengenal adanya lembaga Pengadilan Agama yang mengatur setiap persoalan dan sengketa antara umat islam yang yang ingin memperoleh keadilan dalam masalah perdata yang telah diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 yang sekarang mengalami dua kali perubahan dari UU No. 3 Tahun 2006 hingga sekarang menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini dapat diperjelas dengan memperhatikan pasal 54 bab IV UU No. Tahun 1989 tentang hukum acara yang berbunyi :

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut bahwa pasal 54 UUPA ini menunjuk hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Umum berlaku juga dalam lingkungan Peradilan Agama.

Untuk beracara di muka Peradilan Agama orang yang harus memahami secara benar dan baik hukum acara yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 1989 sebagai ketentuan khusus. Selanjutnya orang harus memahami dan mengerti pula terhadap aturan-aturan hukum acara perdata yang dipergunakan di muka Peradilan Umum sebagai ketentuan umumnya. Selain itu orang juga harus memahami

¹ H. Zain Badjeber dan Abdullah Rahman Saleh, *undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar* (Jakarta : Pustaka Armani, 1990), h. 3.

bagaimana cara mewujudkan hukum materrial Islam melalui hukum peroses Islam.

Terhadap yang disebutkan di Atas, memberikan sedikit gambaran sebagai berikut : Alat bukti saksi misalnya, ia tidak diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 itu berarti harus berpedoman kepada alat bukti saksi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Umum.

Alat bukti saksi bagi Peradilan Umum, umumnya sudah dipandang memadai kalau saksi itu : (1) tidak dipaksa, (2) tidak de auditu, (3) dewasa, (4) tidak ada hubungan keluarga darah atau semenda yang dekat atau hubungan atasan dan bawahan dalam kerja, (5) dua orang atau lebih atau satu orang tapi ada alat bukti lain disampingnya, (6) kesaksian diberikan di bawah sumpah.

Dalam hukum proses Islam banyak lagi persoalannya, misalnya : (1) apakah saksi mesti beragama Islam atau tidak atau dalam keadaan bagaimana yang diperkenankan non Islam, (2) kapan saksi itu dapat diterima kalau lelaki semua dan empat orang pula bahkan harus beragama Islam, (3) kapan saksi itu boleh digantikan dengan bersumpah lima kali, (4) kapan boleh kesaksian satu saksi ditambah sumpah penggugat, dan lain sebagainya.

Contoh-contoh tersebut memberikan pengertian bahwa ber-Acara di muka Pengadilan Agama, juga harus menguasai pokok-pokok hukum formal Islam dan acara penerapannya.²

Dalam mempergunakan saksi di muka sidang Pengadilan Agama hendaknya kita tahu membedakan apakah saksi sebgai syarat hukum atau saksi

² Dr. H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. XIV; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 23-24.

sebagai alat pembuktian, sebab fungsi keduanya itu berbeda. Sebagai misal, 2 orang saksi adalah sebagai syarat hukum untuk sahnya perkawinan, namun untuk membuktikan adanya perkawinan tidak mesti dengan 2 orang saksi betul, melainkan dapat dengan cara lain, seperti : (1) dengan pengakuan kedua suami-istri dengan sumpahnya, (2) dengan adanya akta nikah, (3) dengan seorang saksi ditambah sumpah dari salah seorang suami-istri dimaksudkan, (4) dan sebagainya, hal-hal tersebut diakui oleh para ahli hukum Islam.

Pengadilan Agama dalam hal ini, tentunya bukan bermaksud mau mengawinkan orang melainkan hanya untuk membuktikan ada atau tidaknya nikah. Jika saksi sebagai syarat hukum, rasanya kita sepakat bahwa tanpa kesaksian 2 orang saksi yang beragama Islam perkawinan tidak sah.

Status saksi ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum dan ada kalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir ini kita harus menggunakan saksi di situ sebagai syarat hukum , sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup (implisit) di dalam syarat hukum, dengan kata lain, segala saksi yang memenuhi syarat hukum, otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya.³

Contohnya seorang suami mengajukan permohonan untuk menceraikan istrinya dengan cerai thalaq, dengan alasan istrinya telah melakukan zina, yaitu untuk memenuhi alasan bolehnya bercerai seperti disebutkan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

³ *Ibid.*, h. 160-161.

Dalam hal ini kedudukan saksi yang diajukan suami bukanlah menempati sebagai syarat hukum tetapi hanya menempati syarat pembuktian untuk boleh dijadikan syarat hukum untuk berlakunya rajam. Seandainya Pengadilan Agama berwenang memberlakukan rajam maka kedudukan saksi di situ dapat dipandang sebagai syarat hukum, hal mana berarti mutlak dengan kesaksian empat orang lelaki yang beragama Islam atau dengan li'an atau dengan jalan pengakuan istri.

Untuk dapat persis mendudukan saksi sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian, tidaklah mungkin apabila tidak menguasai sepenuhnya hukum material Islam, sebab syarat hukum itu adalah syarat material dan syarat pembuktian adalah syarat formal. Untuk mengukur kedudukan saksi harus kontekstual, artinya dalam hubungan apa dan untuk keperluan apa saksi diajukan di muka Pengadilan Agama penggunaan saksi untuk syarat hukum terhadap saksi untuk syarat pembuktian atau sebaliknya, tentu saja menyebabkan kacaunya mengartikan saksi dan oleh karenanya harus hati-hati jangan terbalik atau salah menempatkannya. Salah penggunaan atau penerapan akan mengakibatkan kesalahan dalam mewujudkan hukum material.

Eksistensi saksi dalam persidangan selain di samping sebagai syarat pembuktian sekaligus sebagai syarat hukum dimana kesaksian yang diberikan dapat memperjelas permasalahan yang terjadi pada pihak-pihak yang berperkara. Hal ini dapat dikatakan bahwa kesaksian tersebut dipandang perlu demi mengungkap kebenaran yang ada pada salah satu pihak yang berperkara, karena ada asas terpenting yang diharapkan dapat terwujud dengan adanya kepastian

hukum yang diberikan melalui proses hukum di pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang dapat memberikan keadilan yang ingin diperoleh setiap orang atau sebagai komunitas manusia yang benar-benar memiliki tanggung jawab dalam bersosialisasi dengan sesamanya. Sehingga tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang terasa merugikan sesamanya.⁴

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran-kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang Pengadilan. Ada juga saksi-saksi diminta datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan, seperti saksi diminta datang untuk menyaksikan akad nikah atau pembagian warisan dan sebagainya.

Memberi keterangan yang diperlukan oleh hakim merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh saksi. Bila perlu keterangan itu dapat saling dikonfrontir dan bila ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi harus disampaikan melalui ketua majelis hakim. Jadi yang berkepentingan tidak boleh langsung melakukan tanya jawab kepada saksi, melainkan melalui ketua majelis hakim, tanya jawab itu dapat disalurkan. Selain itu ketua majelis dapat menolak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu apabila dianggap tidak relevan dengan pokok perkara yang dipersengketakan.⁵

⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Cet. X; Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 11.

⁵ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama* (Cet. III; Jakarta: PT. Prenada Media, 2005), h.253.

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu, saksi bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis. Jika saksi tidak hadir dalam persidangan, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiranya itu tanpa alasan yang sah, maka ia harus dikenakan sanksi berupa hukuman membayar biaya yang dikeluarkan karena pemanggilan yang sia-sia kepada pihak yang berperkara sebagai akibat tidak hadirnya itu. Apabila saksi tidak menghadap, dapat diperintahkan pula untuk dibawa dengan paksa oleh polisi atas perintah hakim untuk memenuhi kewajibanya sebagai saksi. Kecuali tidak hadirnya saksi di dalam persidangan itu karena sebab yang sah, pengadilan dapat menghapus hukuman itu sesuai dengan pasal 140-142 HIR dan pasal 166-168 R.Bg.⁶

Jika saksi bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama yang memeriksa perkara itu, maka berdasarkan pasal 143 HIR dan pasal 170 R.Bg pemeriksaan saksi tersebut dapat dilimpahkan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal saksi tersebut. Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut memohon bantuan pemeriksaan saksi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal saksi yang diperlukan itu, Pengadilan Agama yang menerima permintaan pemeriksaan saksi itu, segera memanggil saksi tersebut untuk hadir dalam sidang yang telah ditentukan. Pemeriksaan saksi

⁶ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum, op. cit.*, h. 249.

tersebut sesuai dengan daftar pertanyaan yang dikirim oleh Pengadilan Agama yang meminta pemeriksaan saksi tersebut. Hasil pemeriksaan saksi itu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh hakim dan panitera yang memeriksa saksi tersebut. Berita Acara Pemeriksaan tersebut segera dikirim kepada Pengadilan Agama yang meminta pemeriksaan saksi tersebut. Pengadilan Agama yang memeriksa perkara atau memohon pemeriksaan saksi itu, jika telah menerima hasil pemeriksaan saksi dari Pengadilan Agama yang memeriksa saksi itu segera membuka sidang kembali. Hasil pemeriksaan saksi itu dibacakan dalam persidangan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara.⁷

Penulis menganggap dengan adanya pemanggilan saksi secara paksa bagi saksi yang tidak menghadap di Pengadilan walaupun telah dilakukan pemanggilan atas saksi tersebut membuktikan bahwa saksi mempunyai kedudukan yang penting sebagai alat bukti yaitu untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan saksikan sendiri atau dengan kata lain dengan adanya saksi maka dapat membantu hakim dalam mencari kebenaran.

⁷ *Ibid.*, h. 251.

B. Tujuan dan Manfaat Saksi Sebagai Alat Bukti

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan sosial yang setiap harinya penuh dengan aktifitas dan kegiatan yang tak terbatas waktu dan tempatnya, siang maupun malam. Oleh karena itu manusia saling membutuhkan satu sama lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhannya. Namun terkadang dalam berinteraksi sering muncul konflik. Dimana konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus-menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.

Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan atas kehendak sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian. Maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sesuai prosedur yang berlaku.

Di Indonesia kita mengenal hukum acara, baik itu hukum acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara Peradilan Agama yang dalam proses pengadilannya masing-masing memeberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat untuk dapat menguatkan masing-masing mereka yang berperkara dengan menunjukkan berbagai macam alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan hukum.

Salah satu bukti tersebut adalah saksi. Saksi merupakan alat bukti yang dibebankan oleh hakim kepada penggugat maupun terrgugat, karena hakim

menilai dengan alat bukti yang lain tidak dapat memberikan keputusan pada proses pengadilan maka jalan satu-satunya adalah saksi sebagai alat bukti pelengkap dan penguat dari alat bukti sebelumnya. Sebagaimana menurut pasal 1902 KUH Perdata, dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, dan untuk penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi.

Tujuan yang ingin dicapai oleh badan peradilan semata-mata demi untuk tercapainya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat, oleh karena itulah salah satu pencapaian proses keadilan adalah mewujudkan proses penyelesaian perkara yang benar-benar mewujudkan nilai keadilan, yang diidamkan oleh setiap manusia. Satu diantaranya ialah mewujudkan keadilan dengan menyelesaikan setiap perkara yang ada dengan prinsip-prinsip dan jiwa keadilan yang semestinya salah satu diantaranya adalah dengan masalah kesaksian, karena kesaksian merupakan salah satu pembuktian dalam beracara di peradilan maka asas-asas pembuktian merupakan sistem yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran serta memutuskan setiap perkara-perkara dengan seadil-adilnya tanpa mengenal perbedaan sosial diantara pihak yang berperkara maupun perbedaan-perbedaan yang dapat mengurangi nilai keadilan itu sendiri.

Oleh karena itulah seperti penulis paparkan di atas bahwa kesaksian itu sendiri dapat mewujudkan keadilan jika kesaksian yang diberikan benar-benar dapat diterima dan sesuai dengan asas-asas pembuktian serta dapat dipertanggung jawabkan oleh saksi, sehingga setiap kesaksian itu dapat diterima dari mana saja

selama kesaksian tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peradilan, dan dalam hal ini Peradilan Agama.

Kesaksian yang diberikan oleh saksi sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh hakim, sehingga setiap saksi yang akan memberikan kesaksiannya haruslah benar-benar memenuhi kriteria yang ada. Walaupun kedudukan saksi dalam suatu persidangan dipandang sangat penting, namun ia tidak bersifat mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi.⁸

Dalam pemeriksaan berlaku asas umum, bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut. Dalam pemeriksaan perkara perdata hakim harus berpegang pada patokan bahwa sesuatu hal meskipun disaksikan sekian banyak saksi. Tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi itu terhadap segala hal yang disampaikan.⁹

Kesesuaian antara keterangan saksi-saksi menjadi syarat mutlak diterimanya kesaksian, adanya keterkaitan dan saling hubungan antara berbagai keterangan. Selain itu, suatu kesaksian harus diyakinkan lagi mengenai sebab-sebab itu, suatu kesaksian harus diyakinkan lagi mengenai sebab-sebab pengetahuannya jika keterangan mengarah kepada pendapat dan analisis saksi yang ia simpulkan dengan akal pikirannya tidak dapat dianggap sebagai kesaksian.

⁸ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Cet. IV; Jakarta : Intermesa, 1992), h. 181.

⁹ H. Abdul Manan, *Op. Cit.*, h. 371.

Kesaksian bersifat objektif, untuk itu pihak-pihak berperkara tidak dapat didengar sebagai saksi, saksi harus dari pihak ketiga kecuali orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi seperti; anak di bawah umur, memiliki hubungan darah dan atau semenda dengan para pihak, memiliki hubungan kerja dan menerima upah dari pihak-pihak berperkara.¹⁰

Oleh karena saksi merupakan orang yang diminta kesaksianya, maka pihak yang dipanggil sebagai saksi tentu memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebenaran sebagai manifestasi dari rasa keadilan bagi setiap orang. Jadi saksi merupakan pihak ketiga yang diminta keteranganya untuk membuktikan gugatan yang diajukan ke muka pengadilan. Dan pada umumnya pihak ketiga lebih transparan memberikan keteranganya.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dan mamfaat dari kesaksian, yaitu :

Tujuanya :

1. Untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu.
2. Untuk lebih menyempurnakan pembuktian sebelumnya, dimana menurut undang-undang suatu kejadian atau peristiwa hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta, namun alat bukti tersebut hanya berkualitas sebagai awal permulaan pembuktian dan untuk lebih sempurnanya maka dapat ditambahkan dengan keterangan saksi.

¹⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara...op. cit.*, h. 70-71.

3. Saksi itu haruslah yang telah dewasa serta berakal sehat ini bertujuan agar kebenaran tentang kesaksiannya itu dapat diperoleh.

Manfaatnya :

1. Dengan hadirnya saksi di persidangan dapat membantu mempercepat jalanya proses persidangan.
2. Dengan adanya saksi maka dapat membantu hakim untuk mencari kebenaran fakta demi tegaknya hukum dan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria persaksian yang dimaksudkan oleh Peradilan Agama adalah sama dengan apa yang telah dimaksudkan oleh Peradilan Umum. Hal ini terlihat pada UU. No. 7 Tahun 1989 jo UU. No. 3 Tahun 2006 jo UU. No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, dan jika ditinjau dari hukum Islam atau sesuai dengan pendapat beberapa Imam Mazhab ada persyaratan-persyaratan tersendiri mengenai saksi maupun tentang saksi non muslim. Dengan kata lain Islam telah menetapkan kriteria yang harus dimiliki oleh saksi yang memberikan persaksiannya di Pengadilan yaitu : Islam, dewasa, adil, merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya.
2. Menurut beberapa Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa pelaksanaan kesaksian non muslim di Pengadilan Agama harus mengacu pada kriteria yang dimaksud dalam undang-undang Peradilan Agama, terutama kriteria yang dimaksud dalam hukum Islam. Dimana hukum Islam menghendaki adanya nilai keadilan dan kebenaran yang terungkap dari kesaksian tersebut dan dalam memeriksa saksi non muslim harus melihat pada peristiwa hukumnya bukan pada subjek hukumnya, bukan melihat siapa yang memberikan keterangan tapi yang dilihat adalah isi dari keterangannya.

B. *Saran-saran*

Setelah selesainya pembahasan kesaksian non muslim pada perkara perdata di Pengadilan Agama, maka penulis menawarkan beberapa pemikiran bahwa :

1. Kepada praktisi hukum Islam hendaknya memutuskan perkara berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah walaupun nash tersebut tidak qath'i dengan melihat bukti-bukti yang diajukan apakah relevan atau tidak.
2. Bagi para hakim, khususnya di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa hendaklah dalam mengambil keputusan yang mengenai keterangan saksi non muslim harus menitik beratkan pada undang-undang yang berlaku, walaupun dalam fiqh ada yang membolehkan dan ada yang menolak. Ini bertujuan untuk mencari keadilan tanpa membedakan status agama dan golongan.
3. Penolakan terhadap kasaksian non muslim kepada orang Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli Hukum Islam, perlu di intervretasi ulang, sebab tujuan utama kesaksian adalah mengungkap kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 1994.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heriani. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Cet, I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT. Al-Ma'arif, 1964.
- Badjeber, H. Zain dan Abdullah Rahman Saleh. *undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentari*. Jakarta : Pustaka Armani, 1990.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Cet; I Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Cet. I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- H. Minhajuddin. *Sistematika Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam 1996.
- Hanafi, Ahmad, MA. *Asas-asas Hukum Pidana Acara Islam*. Yogyakarta : PT . Al-Ma'arif.
- Hiarie, Eddy O.S j. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, 2012.
- Iqbal, Muhammad. <http://iqbalngtzzz.blogspot.com/2011/11/peradilan-dalam-islam.html> (Di akses tanggal 3 Juni 2013).

Madkur, Muhammad Salam. *al-Qur'an Fi Al-Islam*, dialih bahasakan oleh Imran AM, Dengan Judul, *Peradilan Dalam Islam*. Cet. IV; Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Manan, H. Abdul. *Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet V; Jakarta: Kencana, 2008.

_____. *Hukum Pembuktian*. Cet. X; Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.

_____. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Cet. III; Jakarta : PT. Prenada Media, 2005.

Mawir. <http://www.facebook.com/messages/1733166826> (Di akses tgl 13 juni 2013)

Mortokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta : Liberty, 1988.

Norbuko, Cholid, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pius, Abdillah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkola).

Qa'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab r.a*. Cet I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Rasyid Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. XIV; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mutjahid*. jilid II; Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW* . Cet. 19; Jakarta : Pradnya Paramita, 2006.

_____. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. IV; Jakarta : Intermesa, 1992.

Subhani, Ja'far. *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih*. Cet. II; Jakarta: Lentera, 2002.

Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Saksi Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam

Syari'ah Islam, sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad saw., benar-benar telah menjadi landasan bagi penetapan hukum, peradilan dan fatwa bagi dunia Islam. Berbagai suasana telah ditampung dan bermacam-macam suku bangsa telah menggunakan hukumnya, telah banyak peradaban yang telah bertemu di dalamnya namun Islam tidak pernah menjadi sempit karena adanya hal baru dan tidak pernah tidak mampu memenuhi suatu kebutuhan. Sebaliknya Islam memiliki berbagai jawaban untuk setiap peristiwa. Salah satu diantara keluwesan hukum islam adalah mengenai kesaksian non-muslim.

Pada dasarnya para ahli hukum Islam (fuqaha) telah menjelaskan banyak sekali tentang syarat-syarat kesaksian sehingga kesaksian tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam persidangan, yang dijelaskan juga siapa orang yang dapat diterima kesaksiannya dan siapa yang tidak, serta menentukan hukumnya apabila terjadi perbedaan pendapat antara seorang saksi dengan saksi lainnya, tentang kembali dalam kesaksian, menyumpah saksi-saksi, tentang diterimanya kesaksian dengan pendengaran dan sebagainya. Seperti tentang peninjauan kembali pihak-pihak yang berperkara atas saksi-saksi yang diajukan. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya hukum Islam itu sangat fleksibel di dalam mengantisipasi setiap permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat muslim dimana saja dan kapan saja dan semua itu tidak lepas dari pada kontribusi para pakar dan pemikir Islam, yang didorong oleh semangat untuk mempelajari dan

mengamalkan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw., agar manusia selalu mempergunakan akal pikiranya dalam menghadapi hidup terlebih persoalan yang fundamental yang menyangkut akidah atau keyakinan agama.¹

Hukum-hukum yang dapat berubah karena perubahan zaman dan pergantian situasi adalah hukum-hukum yang substansinya ditetapkan dengan melihat kemaslahatan. Karakteristik dan bentuknya diserahkan pada pendapat pemimpin Islam. Hukum-hukum jenis ini dapat berubah. Pembuat syariat tidak membuat substansi, bentuk dan tata caranya. Tidak diperkenankan campur tangan pemimpin Islam dalam masalah ini dan dalam hukum-hukum berkenaan dengan *ahkwal syakhshiyah*. Pemimpin Islam tidak boleh ikut campur dalam hukum-hukum nasab, *mushaharah* (persaudaraan melalui pernikahan), penyusuan dan iddah (*al-adad*). Ia tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan Allah kendatipun sebagai hukuman bagi orang yang berbuat kesalahan.²

Non muslim yang tinggal di Negara Islam dan memperoleh hak-hak asasi mereka yang ditetapkan dalam perlindungan hukum Syari'ah, mereka disebut dengan "Ahl-Dhimmah, yaitu orang-orang yang dilindungi". Orang-orang kafir dhimmi yang hidup di sebuah negara Islam mendapat perlindungan dalam hidup mereka, kekayaan dan kehormatan seperti yang diberlakukan terhadap orang Islam. Hak-hak yang diberikan kepada seseorang kafir dhimmi sudah merupakan ketetapan yang tidak dapat ditarik kembali. Orang Islam wajib melindungi

¹ H. Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam 1996), h. 15.

² Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih* (Cet. II; Jakarta: Lentera, 2002), h. 182.

kehidupan, harta kekayaan dan kehormatan non muslim karena hal itu bagian dari iman.

Kata *dzimmah* berarti perjanjian perlindungan (*al-Ahd*), jaminan (*al-Daman*), keselamatan (*al-Aman*). Orang non muslim itu disebut dhimmi karena mereka berada dalam perjanjian Allah, Rasulullah dan masyarakat Islam, karenanya mereka dapat hidup dalam perlindungan Islam. Dengan kata lain, mereka berada dalam perlindungan orang-orang Islam dan mendapat jaminan keamanan dari mereka. Jaminan keamanan yang diberikan kepada non muslim, misalnya nasionalisme politik yang berlaku pada zaman moderen sekarang atas dasar penduduk memperoleh hak-hak sebagai warga negara dan memiliki beberapa kewajiban.

Para ulama telah mengelompokkan warga non muslim dengan beberapa kategori. Pendapat yang paling tepat ada tiga kategori non muslim yang boleh tinggal di Negara Islam :

1. Kaum dzimmi : *Ahl al-Dzimmah* atau mereka yang mengakui hegemoni negara Islam, yang mempunyai persoalan yang ditetapkan oleh perjanjian keamanan. Negara Islam wajib melindungi mereka berdasarkan perjanjian tersebut.
2. Penduduk yang ditaklukkan : orang non muslim adalah orang yang berperang melawan kaum muslimin, lalu mereka dikalahkan oleh kaum muslim, dan tidak lagi mempunyai kekuatan. Mereka ini otomatis menjadi *dzimmah* atau menjadi tanggung jawab negara Islam,

mereka harus membayar jizyah yang ditetapkan, hidup, harat kekayaan, kehormatan, dan tempat-tempat ibadah mereka dilindungi.

3. Orang non muslim yang tinggal di Negara Islam sebagai warga negara.
4. Penduduk asing yang memilih dengan sukarela hidup di wilayah negara Islam.

Penting untuk mengubah miskonsepsi tentang perbedaan-perbedaan di atas dalam syari'ah, antara muslim, dzimmi, dan non muslim. Sebagian ilmuwan cenderung membuat analogi keliru tentang perbedaan di atas dengan konsep hukum Romawi dalam *Jus Civile* atau *Roman Pax Romana*. Perlu diingat bahwa orang non muslim tidak terlepas dari hukum sebagaimana yang terjadi dalam kasus *Jus Civile*. Begitu pula, kaum muslimin tidak harus menganggap diri mereka sebagai “Penguasa penduduk Dunia” karena mereka bukan “Arbis Romanus”, melainkan hamba Allah belaka. Bahkan sebagai penguasa mereka semata-mata sebagai pemelihara harta kekayaan Allah, bukan pemilik yang sebenarnya, karena segala yang ada di alam semesta dan bumi ini adalah milik Allah. Orang non muslim itu sama di depan hukum dalam segala aspeknya. Perbedaan antara muslim dan non muslim hanyalah salah satu administrasi politik dan bukan pembedaan dalam hak-hak manusianya.

Karena kaum “Dzimmi” dalam “Dzimat Allah”, mereka memperoleh kebebasan beragama, beradministrasi, dan berpolitik hak yang diberikan kepada mereka adalah karena loyalitas dan pembayaran pajak tahunan yang disebut dengan jizyah, untuk pertahanan dan administrasi negara.

di Pengadilan Agama sebab Islam juga mengatur dengan jelas bagaimana seharusnya kaum muslim memperlakukan kaum non muslim.

Membicarakan saksi non muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan, dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapat sorotan yaitu kesaksian non muslim sesama non muslim dan kesaksian non muslim terhadap kaum muslim.

Imam Malik, imam Syafi'i, dan imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non muslim sesama non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda.

Itu mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah swt. menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian yang dusta dan fasik, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir itu dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka, kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mereka mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarang yang demikian itu.

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa kesaksian antara nonmuslim dapat diterima, baik ia seagama maupun berbeda agama. Kesaksian kafir harbi terhadap sesamanya tidak diterima apabila negeri mereka berbeda, demikian pula kesaksian kafir zimmi yang sama-sama berbeda dalam suaka politik tidak dapat diterima secara mutlak.

Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa banyak terjadi tindak pidana di antara mereka yang peristiwanya tidak disaksikan oleh orang Islam melainkan

oleh kalangan mereka sendiri, kemudian mereka berperkara kepada Mahkamah Syariah. Kalau kesaksian di antara mereka ditolak oleh Mahkamah Syariah maka akan mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya, dengan demikian akan terjadi kerusakan besar dan akan mengganggu ketentraman umum. Hal ini tidak disukai oleh syariat Islam yang dianggap adil tersebut. Pendapat Ibnu Taimiyah ini banyak diikuti oleh para praktisi hukum Islam baik di Timur Tengah maupun di beberapa negara Islam lainnya.

Para ahli hukum di kalangan ulama *Hanabilah* membolehkan kesaksian dari saksi non muslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan orang Islam, kecuali mereka yang beragama non muslim. Menurut Ibnu Mudzin pendapat ini dipakai juga oleh Syuraih, an-Nakha'i dan al-Ausa't dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hanya saja mereka berselisih tentang pengertian non muslim, Syuraih mengatakan bahwa hal itu hanya mencakup orang non muslim yang ahli kitab saja, sedangkan selainnya mengatakan bahwa non muslim di sini mencakup semua orang di luar Islam, termasuk juga orang Majusi dan penyembah berhala.

Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i menolak kesaksian orang-orang non muslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter nonmuslim terhadap suatu peristiwa dan kejadian. Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian nonmuslim kepada orang muslim sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali. Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang

dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima. Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qayyim tidak ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pendapat Ibnu Qayyim tersebut sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, dimana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi berbaur satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila permasalahan di antara mereka bukanlah suatu hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Para praktisi hukum di beberapa negara Islam, pendapat Ibnu Qayyim ini banyak dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, kalau syarat hukum berkenaan dengan syarat materil dan berhubungan dengan diyanatun, sedangkan saksi sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan *qadhaan*.⁵

Menyinggung pengertian kesaksian non muslim dalam kaitanya dengan hukum pembuktian dapat diperjelas dengan adanya unsur saksi sebagai alat bukti, adapun non muslimnya adalah atribut pembeda dengan pemeluk agama Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa kesaksian non muslim itu merupakan persaksian yang berasal dari orang yang beragama selain Islam atau tidak seakidah, yang

⁵Muhammad Iqbal, <http://iqbalngtgzzz.blogspot.com/2011/11/peradilan-dalam-islam.html> (3 Juni 2013).

dengan sendirinya perlu ada suatu aturan atau hukum yang mengatur persoalan itu secara jelas dan pasti, dan dalam hal ini tentunya adalah hukum Islam.

Mengenai kualitas kesaksian, dalam Islam persyaratan kesaksian ternyata bukan hanya itu saja tetapi faktor agama termasuk sebagai salah satu hal yang sangat penting. Dalam berbagai kasus baik yang sifatnya perdata atau pidana Islam, menetapkan salah satu persyaratan kesaksian, haruslah beragama Islam, seperti dalam kasus perzinahan yaitu harus mendatangkan empat orang saksi yang beragama Islam dan dalam kasus pembuktian perkara hudud harus juga mendatangkan dua orang saksi yang beragama Islam, secara tidak langsung Islam cenderung memandag bahwa kesaksian itu hanya dapat diterima bila saksinya beragama Islam.⁶

Kehadiran saksi non muslim di depan sidang Pengadilan, baik sebagai saksi biasa maupun sebagai saksi ahli (misalnya dokter spesialis), sangat penting untuk dikaji ulang. Karena menurut hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama saat ini, masalah agama seorang saksi tidak diatur secara kongkrit. Sementara hukum Islam dalam aturan fikih konvensional mensyaratkan saksi harus beragama Islam.

Perlu disadari bahwa prinsip-prinsip umum dalam pembuktian sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Dr. TM. Hasby Ash Shiddieqy dalam bukunya “Peradilan dan Hukum Acara Islam” yaitu :

“Oleh karena mengharuskan seseorang memperoleh berita secara mutawatir itu, menimbulkan kesukaran dan dapat menghilangkan banyak hal, maka agama membolehkan hakim menerima keterangan yang dapat menimbulkan persangkaan tersebut”.⁷

⁶ *Ibid.*, h. 379.

⁷ TM. Hasby Ash Shiddieqy, *op., cit.* h. 109.

Maka dapat dikatakan kesaksian yang diberikan oleh siapa saja dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu pembuktian di dalam persidangan. Terkecuali dalam hal-hal tertentu yang tidak membolehkan adanya kesaksian dari golongan selain golongan muslim sendiri seperti saksi dalam akad nikah.

Berbicara mengenai kesaksian, dimana dalam era globalisasi seperti sekarang ini, penerapan ketentuan seorang saksi harus beragama Islam, sebagaimana aturan fikih konvensional, tapi hal tersebut sangat sulit untuk dipertahankan. Dalam kehidupan sosial yang majemuk, dimana proses akulturasi dan asimilasi sosial semakin tajam tanpa adanya perbedaan suku, ras, dan agama, salah satunya menyebabkan lingkungan kehidupan masyarakat muslim semakin heterogen. Banyak peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi bagi masyarakat muslim yang hidup di lingkungan yang heterogen tersebut, disaksikan atau diketahui oleh orang non-muslim, atau membutuhkan surat keterangan dari saksi ahli yang bukan muslim.

Karena masalah persaksian adalah masalah yang dipandang penting dalam memutuskan suatu perkara maka persaksian non muslim yang diberikan didepan hakim dimata hukum dipandang sama dengan kesaksian orang Islam. Walaupun dalam Islam masalah kesaksian pada dasarnya masalah kekuasaan, padahal non muslim itu sendiri tidak berkuasa atas orang muslim maka kesaksian mereka diterima dalam sidang pengadilan walaupun dipandang darurat jika tidak ada saksi muslim lainnya. Karena tujuan yang ingin dicapai tidak lain untuk membuktikan hak orang lain atas lainnya sesuai dengan prinsip keadilan.

Karena apabila orang non muslim tidak dibenarkan memberikan kesaksian di Pengadilan Agama, tentu orang-orang Islam yang berperkara akan mendapat kesulitan dan kerugian. Seperti terjadinya perselisihan antara suami istri

dalam rumah tangga yang kebetulan disaksikan oleh tetangganya atau keluarganya yang non muslim, sedangkan saksi lain tidak ada.

Apakah dalam proses sidang pemeriksaan suatu perkara guna mengetahui suatu peristiwa atau kejadian antara kedua belah pihak yang berperkara hanya dan harus dengan saksi muslim saja. Dapat dan *ma'qul* kah pihak-pihak yang bertengkar atau bersengketa lebih dahulu mengundang atau mempersiapkan saksi-saksi muslim untuk menyaksikannya. Rasanya sangat sulit untuk dibayangkan dan dinalar bahwa setiap peristiwa atau kejadian hukum harus disaksikan oleh orang-orang Islam saja.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, serta kenyataan yang ada dalam kehidupan ketatanegaraan dan Pancasila sebagai sumber hukum, maka perlu adanya pemikiran jauh ke depan tentang kemungkinan hadirnya saksi non muslim dalam persidangan di Pengadilan Agama. Kenyataan tidak dapat disangkal lagi bahwa banyak pejabat Negara yang tidak seluruhnya orang muslim, dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan banyak yang non muslim. Demikian juga kehendak salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan dengan alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun. Bagaimana kalau hakim memutus perkara pidana terhadap salah satu pihak itu beragama non muslim? Padahal putusan Pengadilan Negeri itu merupakan alat bukti bagi para pihak kepada majelis hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara tersebut.

Dalam masalah perceraian karena alasan cacat badan yang tidak bisa disembuhkan, adanya penganiayaan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan bukan suatu hal yang mustahil untuk memberikan kesaksian dalam persidangan adalah saksi non muslim atau yang memberi visum adalah dokter yang non muslim.

Apakah hakim Pengadilan Agama harus menolak kesaksian tersebut? Demikian pula dengan perkara izin poligami dengan alasan istri tak dapat melahirkan keturunan, penempatan asal-usul anak, perwalian, isbath nikah, dan harta bersama yang kemungkinan besar surat-surat yang dijadikan bukti dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama itu dibuat oleh pejabat yang bukan beragama Islam, atau saksi yang diajukan beragama non muslim.

Dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai tersebut dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, serta ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kaidah *fiqhiya* dan kenyataan kondisi yang hidup dengan keadaan masyarakat, maka kesaksian non muslim baik berupa keterangan saksi, maupun berupa akta autentik dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama.⁸

Untuk itu penulis menganggap bahwasanya persyaratan saksi harus beragama Islam dalam perspektif fiqh klasik perlu direinterpretasi, karena tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.

⁸ H. Abdul Manan, *op, cit.*, h. 383.

B. Legalitas Kesaksian Non-muslim di Pengadilan Agama

Peradilan Agama yang merupakan lembaga yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku memiliki landasan yang sangat kuat secara filosofis, yuridis dan historis maupun sosiologis. Secara filosofis, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan keyakinan kepada Allah guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, merupakan bagian dari supra-struktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah saw., dan secara sosiologis, lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk.

Peradilan Agama yang merupakan lembaga bagi orang-orang Islam yang ingin mencari keadilan memainkan peranan ganda. Di satu sisi, ia berkapasitas sebagai lembaga agama, dan sisi lain merupakan lembaga hukum. Sebagai peradilan negara dan sebagai Peradilan Islam, Peradilan Agama mengindahkan dua aturan hukum, yaitu hukum negara dan hukum Islam yang ditransformasikan kedalam bentuk hukum tertulis.

Hal inilah yang mendasari adanya aturan khusus beracara pada Peradilan Agama. Namun secara realita, belum semua aturan beracara menurut hukum Islam

(*fiqh*) itu ditransformasikan kedalam hukum tertulis, yakni dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Akibatnya, tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama pada saat ini tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan konsef *fiqh*. Misalnya tentang persyaratan beragama Islam bagi seorang saksi yang akan didengar keteranganya di depan sidang pengadilan. Sehubungan dengan masalah ini, di kalangan Hakim Peradilan Agama sendiri pun terjadi perbedaan pendapat tentang diterima atau ditolaknya kesaksian non-muslim.

Mengenai pembuktian dengan kesaksian merupakan cara terpenting dalam pembuktian di depan hakim, karena suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata kepala sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Di dalam kompilasi hukum Islam termuat daam pasal 24 bab IV ayat 1-2 tentang perkawinan bahwasanya saksi itu merupakan rukun perkawinan dan setiap perkawinan haruslah memiliki 2 orang saksi, sedangkan dalam pasal 25 bab IV dijelaskan tentang syarat-syarat saksi dalam akad nikah ialah saksi harus beragama Islam, baligh, adil, tidak terganggu ingatan dan tidak tuli atau tuna rungu.⁹

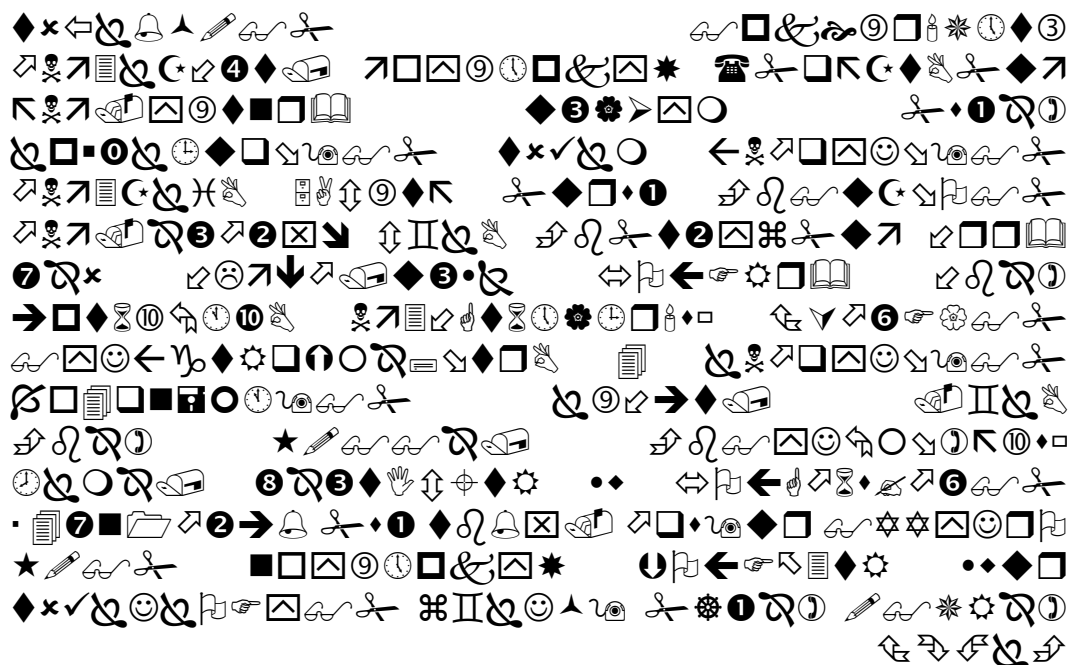
Dalam keterangan tersebut di atas adalah merupakan ketentuan yang berlaku dalam kompilasi hukum Islam terhadap saksi dalam perkawinan atau akad nikah, yang mana keislaman saksi adalah merupakan syarat dalam suatu akad nikah yang membutuhkan 2 orang saksi laki-laki sedangkan dalam pasal 195,196

⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 85.

dan 206 bab IV tentang *aul* dan *rad* saksi tidak diisyaratkan harus beragama Islam. Disini menunjukkan bahwa saksi dapat saja beragama lain selama peristiwa tersebut disaksikannya sendiri atau dialami secara pribadi.

Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kesaksian dari non-muslim dapat dibenarkan selama hal tersebut tidak menyangkut masalah pernikahan. Sehingga dalam perkara perdata kesaksian non-muslim dibenarkan oleh Islam dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian di Pengadilan Agama. Adapun hal-hal atau kasus dan dapat melibatkan non-muslim dalam persidangan menurut Islam ialah menyangkut masalah keperdataan selain nikah, misalnya dalam masalah hibah, wakaf, wasiat atau dalam masalah pidana.

Adapun dasar dari kesaksian non-muslim yaitu berdasarkan firman Allah swt., dalam QS. al-Ma'idah 5/106 :



Tejemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".¹⁰

Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *min ghairikum* (saksi selain agamamu) adalah dari ahli kitab dan dibolehkannya disini adalah karena dalam keadaan darurat, karena dalam keadaan bepergian yang tidak didapatkan saksi dari orang Islam.¹¹

Pendapat yang mengatakan bolehnya diterima kesaksian non-muslim dengan sumpah dalam semua perkara yang tidak didapatkan saksi yang muslim, maka disini ada satu segi, yaitu bolehnya kesaksian mereka itu adalah sebagai ganti secara mutlak, padahal masalah kesaksian itu pada letaknya adalah pada segi dapatnya disingkap tabir yang menutupi kebenaran, karena bukti menurut Ibnu Qayyim adalah perkara dapat menjelaskan dan menyampaikan kebenaran sesuatu, sedang non-muslim kadangkala dapat menjamin dan dijamin kepercayaanya maka dalam hal ini dapatlah diterima kesaksiannya dan dipergunakan.

Adapun jika dalam keadaan darurat dan diperlukan, maka boleh ada kesaksian non-muslim terhadap muslim, diantaranya mengenai kesaksiannya dalam hal wasiat dalam bepergian. Adapun pengertian darurat sebagaimana penulis

¹⁰ Departemen Agama. *al-Qur'an dan... op. Cit.*, h. 125.

¹¹ Muhammad Salam Madkur, *al-Qur'an Fi Al-Islam*, dialih bahasakan oleh Imran AM, Dengan Judul, *Peradilan Dalam Islam* (Cet. IV; Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 109.

paparkan di atas adalah sesuatu yang memaksa bagi diubahnya ketetapan hukum yang sesuai dengan kondisi saat itu.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan di atas, Syekh Mahmoud Syaltout mengemukakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan saksi lebih dititikberatkan kepada utamanya sifat kepercayaan dan kebenaran suatu peristiwa. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang mendalam tidak ada dalil yang konkret tentang tidak boleh diterimanya keterangan kesaksian dari saksi non-muslim baik yang menyangkut bidang muamalah maupun bidang jinayat, yang penting saksi itu jujur, adil, dan dapat dipercaya meskipun ia bukan beragama Islam.

Lebih lanjut syaltout mengemukakan bahwa banyaknya para ahli hukum Islam yang menolak kehadiran saksi non-muslim di depan Pengadilan Islam sebenarnya hanya tergantung pada ruang dan waktu tertentu saja, berdasarkan dalil-dalil yang *qath'i*. Praktisi hukum haruslah berpegang kepada kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa hukum itu akan berubah dengan adanya perubahan waktu dan tempat. Dengan demikian pendapat yang menolak kehadiran saksi non-muslim di sidang pengadilan sebagaimana dalam fiqh-fiqh yang muktabar perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, serta kenyataan yang ada dalam kehidupan Ketatanegaraan Negara Indonesia dan Pancasila sebagai sumber hukum, maka perlu adanya pemikiran jauh kedepan tentang kemungkinan hadirnya saksi non-muslim dalam persidangan Pengadilan Agama. kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa banyak pejabat negara Indonesia ini tidak

seluruhnya muslim, dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa/kelurahan banyak yang non-muslim.¹²

Karena kesaksian dalam pembuktian dipandang sebagai hal yang urgen dalam penyelesaian suatu perkara, maka asas yang dianut dalam hukum pembuktian hendaknya perlu mendapat perhatian lebih dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Sehingga tentang saksi pun harus memenuhi kriteria yang ditetapkan pengadilan sehingga dapat menjadi saksi. Dan dalam hal ini khusus bagi saksi telah diatur syarat-syarat untuk menjadi saksi.

Bukti kesaksian yang dilaksanakan non muslim dalam suatu persidangan, dianggap sah bila telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan. Serta telah memenuhi syarat-syarat saksi sehingga dapat dikatakan untuk mendudukan saksi sebagai syarat hukum atautkah syarat pembuktian atau syarat hukum sekaligus pembuktian.

Dalam proses pelaksanaan kesaksian bagi non muslim di Pengadilan Agama, oleh para fuqaha dianggap sebagai kekuasaan, maka orang muslim boleh menjadi saksi atau non muslim yang bersengketa, karena orang muslim memiliki kepatutan dan keahlian menguasai sesama muslim, maka terlebih lagi terhadap kafir dzimmi dan kafir yang dilindungi dalam suaka politik.

Adapun kesaksian non muslim untuk orang muslim, pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan beberapa pandangan :

1. Menurut pendapat diantara fuqaha, bahwa apabila manusia seluruhnya fasiq kecuali hanya beberapa orang saja, maka kesaksian satu sama lain dapat diterima.

¹² *Ibid.*, h. 382-383.

2. Menurut sebagian fuqaha berpendapat bahwa kesaksian non muslim atas orang muslim dapat diterima dengan alasan darurat.¹³

Mengenai kesaksian non muslim secara tegas dapat dikatakan bahwa persaksian dari non muslim dari perkara orang Islam dalam perkara perdata memiliki nilai sama seperti persaksian orang Islam, walaupun ada pengecualian dalam hal-hal tertentu, tetapi tujuan dari kesaksian mereka adalah sama yaitu untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh badan peradilan yaitu semata-mata demi untuk tercapainya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat.

Oleh karena itu salah satu pencapaian proses keadilan adalah mewujudkan nilai keadilan dengan menyelesaikan setiap perkara yang ada dengan prinsip dan jiwa keadilan yang semestinya. Salah satu diantaranya adalah masalah kesaksian, karena kesaksian merupakan salah satu pembuktian dalam beracara di Peradilan.

Oleh karena itulah seperti yang penulis paparkan sebelumnya bahwa kesaksian itu sendiri dapat mewujudkan keadilan jika kesaksian yang diberikan benar-benar dapat diterima dan sesuai dengan asas-asas pembuktian serta dapat dipertanggung jawabkan oleh saksi, sehingga kesaksian itu dapat diterima dari siapa saja, selama kesaksian itu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peradilan dan dalam hal ini Peradilan Agama.

Terlepas dari soal saksi muslim atau non muslim adalah merupakan kewajiban atas setiap pihak yang berperkara selalu memberikan bukti atas perkara yang diajukan. Terlebih jika pembuktian tersebut tidak memenuhi syarat, maka pengadilan berhak untuk menolak pembuktian tersebut.

¹³ Muhammad Salam Madkur, *op. cit.*, h. 108.

Karena adanya latar belakang perbedaan agama maka saksi non muslim dipandang sebagai pengganti atas ketidakberadaanya saksi muslim, atau dengan kata lain dipandang sebagai psuatu perbuatan yang sifatnya darurat menurut hukum Islam. Hal ini juga dipandang sbegai *al-Hajiyat* atau sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan.¹⁴

Dari keterangan-keterangan tersebut dan dari dalil-dalil yang telah menjelaskan, maka penulis menyimpulkan bahwa proses kesaksian non muslim di Pengadilan Agama adalah :

1. Dalam keadaan terpaksa atau darurat
2. Melalui sumpah
3. Apabila kesaksianya relevan terhadap perkara
4. Apabila kesaksianya itu tidak menyangkut akidah agama Islam, melainkan masalah-masalah perdata, seperti wasiat, warisan, isbath nikah, ekonomi syariah, dll.

Menurut Sultan, hakim dalam melihat seorang saksi harus dititik beratkan kepada kejujuranya di depan persidangan, sehingga baik itu saksinya seorang muslim atau non-muslim tidak lagi dipermasalahkan di dalam persidangan. Dalam memeriksa saksi non-muslim hakim melihat pada peristiwa hukum bukan pada subjek hukumnya, atau siapa yang memberikan keterangan, tapi melihat isi dari keterangan tersebut relevan atau tidak.

Perubahan hukum yang terjadi disebabkan adanya perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dimana bisa saja seorang non-muslim menjadi satu-

¹⁴ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 77.

satunya saksi dalam peristiwa yang dipersengketakan, dan kesaksian muslim dan non-muslim itu sama saja selama saksi tersebut mau disumpah berdasarkan agamanya masing-masing.¹⁵

Menurut Mukhtaruddin Bahrum, kesaksian itu dilihat dari substansi hukum, bukan subjek hukumnya. Dalam memeriksa saksi yang paling utama adalah mengungkap kebenaran dari peristiwa tersebut, tidak lagi mempermasalahkan agama dari saksi tersebut, bahkan sekarang seorang non-muslim banyak yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi.

Dalam memandang hal tersebut, bahwasanya rugi kalau misalkan kesaksian non-muslim tersebut tidak diterima, selama persaksiannya itu relevan dan mengungkap kebenaran.¹⁶

Menurut Mawir, Saksi non muslim dapat dijadikan saksi dalam persidangan sepanjang kesaksiannya menjurus kepada fakta peristiwa dan orang tersebut dapat dipercaya, yang lebih penting adalah terpenuhinya syarat formil materil bukti saksi. Memang sebagian berpendapat terutama imam mazhab 4 berpendapat saksi non muslim tidak dapat dihadirkan dgn alasan berbeda keyakinan, namun dari perkembangan hukum seperti Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan

¹⁵ Sultan, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa, Sul-sel (Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, 30 Mei 2013).

¹⁶ Muktaruddin Bahrin, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa, Sul-sel (wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, 30 Mei 2013).

Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima.¹⁷

Dari pendapat beberapa hakim tersebut penulis menganggap bahwasanya kesaksian seorang non-muslim di Pengadilan Agama dapat diterima, selama saksi tersebut dianggap bisa memberikan keterangan yang benar di depan hakim.

¹⁷ Mawir, Hakim Pengadilan Agama Tahuna Kab. Talaud Sangihe, Sulut (wawancara Penulis melalui media sosial Facebook), <http://www.facebook.com/messages/1733166826> (di akses tgl. 13 Juni 2013).

L

A

M

P

Q

R

A

N

1. SK PEMBIMBING
2. PENGESAHAN DRAFT
3. SURAT IZIN PENELITIAN
4. REKOMENDASI PENELITIAN DARI GUBERNUR
5. LEMBAR DISPOSISI
6. SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI
7. DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA.
- 8.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 1994.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heriani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Cet, I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.
- Hukum Pembuktian*. Cet. X; Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
- Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Ash Shiddeeqy, TM. Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Cet. I ; Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Badjeber, H. Zain dan Abdullah Rahman Saleh, *undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar*. Jakarta : Pustaka Armani, 1990.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Cet; I Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Cet. I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- H. Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam 1996.
- Hanafi, Ahmad, MA., *Asas-asas Hukum Pidana Acara Islam*. Yogyakarta : PT . Al-Ma'arif.
- Hiarie, Eddy O.S j, *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga, 2012.
- <http://iqbalngtzzz.blogspot.com/2011/11/peradilan-dalam-islam.html> (3 Juni 2013).

Madkur, Muhammad Salam, *al-Qur'an Fi Al-Islam*, dialih bahasakan oleh Imran AM, Dengan Judul, *Peradilan Dalam Islam*. Cet. IV; Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Manan, H. Abdul, *Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet V; Jakarta: Kencana, 2008.

-----, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Cet. III; Jakarta : PT. Prenada Media, 2005.

Mortokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta : Liberty, 1988.

Norbuko, Cholid, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pius, Abdillah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkola).

-----*Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. IV; Jakarta : Intermesa, 1992.

Qa'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab r.a*. Cet I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Rasyid Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. XIV; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mutjahid*. jilid 2; Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Shiddieqy, M. Hasbi Ash, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT. Al-Ma'arif, 1964.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW* . Cet. 19; Jakarta : Pradnya Paramita, 2006.

Subhani, Ja'far, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih*. Cet. II; Jakarta: Lentera, 2002.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Zainal Abduh, kelahiran Toli-toli, 18 Juni 1990. Anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Abduh dan Intan. Riwayat pendidikannya dimulai dari SD Neg. 3 Mae, desa Dadakitan, kab. Toli-toli hingga tahun 2003, SMP Neg. 1 Mattirobulu, kab. Pinrang hingga tahun 2006, dan SMA Neg.

1

Mattirobulu hingga tahun 2009, hingga kemudian Allah menakdirkan untuk lanjut di Perguruan Tinggi di UIN Alauddin Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Peradilan hingga meraih gelar sarjananya ditahun 2013. Keinginan terbesarnya adalah agar bisa melihat orang-orang disekitarnya selalu tersenyum. Cita- cita terbesarnya hanya ingin membahagiakan kedua orang tuanya, dan apapun jadinya nanti, ia hanya berharap agar bisa menjadi seorang manusia yang memiliki manfaat bagi orang lain, namun itu tidak terlepas dari sebuah pilahan, sebagaimana dalam QS As-Syam 91/1-10 :

*demi matahari dan cahayanya di pagi hari,
dan bulan apabila mengiringinya,
dan siang apabila menampakkannya,
dan malam apabila menutupinya,
dan langit serta pembinaannya,
dan bumi serta penghamparannya,
dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),
Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan
ketakwaannya.
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.*

(As-Syam : 1-10)